

## KELOMPOK KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

**Muhammad Hanri,  
Ph.D.**

hanri@lpem-feui.org

**Nia Kurnia Sholihah, S.E.**

nia.kurnia@lpem-  
feui.org

## DAFTAR ISI

Tingkat Pengangguran di  
Indonesia – 1

Rata-rata Upah dan Gaji  
– 2

Isu Terkini: Kenaikan  
Upah Minimum Provinsi  
– 3

## RINGKASAN

**P**ada Agustus 2021, tercatat bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19. Akan tetapi, rata-rata upah/ gaji pekerja per bulan mengalami penurunan (yoy). Di sisi lain, penetapan upah minimum tahun 2022 dilakukan pada periode mendekati akhir 2021 ini direncanakan naik rata-rata sebesar 1,09%. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah sehubungan dengan angka pengangguran di Indonesia yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

### Tingkat Pengangguran di Indonesia

Berdasarkan estimasi melalui Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2021, BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran secara nasional (6,49%) mengalami peningkatan dibandingkan dengan Maret 2021 (6,26%) tetapi menurun jika dibandingkan dengan Agustus 2021 (7,07%), dengan penurunan sebesar 0,58 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih tinggi terjadi di perkotaan (8,32%) dibandingkan dengan di pedesaan (4,17%) dan lebih banyak di kalangan pria (6,74%) dibandingkan dengan wanita (6,11%). Tercatat bahwa pada periode Agustus 2021, TPT pria turun lebih besar dibandingkan dengan TPT wanita (yoy), sedangkan TPT di perkotaan turun lebih besar dibandingkan dengan TPT di pedesaan.

**Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Berdasarkan Provinsi**

| Provinsi                   | 2020 (%) | 2021 (%) | △ 2021-2020 |
|----------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Kenaikan Tertinggi</b>  |          |          |             |
| Kalimantan Selatan         | 4,74     | 4,95     | 0,21        |
| Lampung                    | 4,67     | 4,69     | 0,02        |
| Kalimantan Barat           | 5,81     | 5,82     | 0,01        |
| DI Yogyakarta              | 4,57     | 4,56     | -0,01       |
| Sulawesi Tengah            | 3,77     | 3,75     | -0,02       |
| <b>Penurunan Tertinggi</b> |          |          |             |
| Nusa Tenggara Barat        | 4,22     | 3,01     | -1,21       |
| Gorontalo                  | 4,28     | 3,01     | -1,27       |
| Banten                     | 10,64    | 8,98     | -1,66       |
| Riau                       | 6,32     | 4,42     | -1,90       |
| DKI Jakarta                | 10,95    | 8,50     | -2,45       |

Sumber: BPS, 2021, diolah

Di sisi lain, jika dilihat di level provinsi, Provinsi Kepulauan Riau (9,91%), Jawa Barat (9,82%), dan Banten (8,98%) merupakan tiga provinsi dengan TPT tertinggi pada Agustus 2021. Provinsi Sulawesi Barat (3,13%), Nusa Tenggara Barat (3,01%), dan Gorontalo (3,01%) tercatat menjadi provinsi dengan TPT terendah pada periode yang sama. Sementara itu, hampir seluruh provinsi tercatat mengalami penurunan TPT dibandingkan dengan Agustus 2020 kecuali tiga provinsi yang masing-masing mengalami peningkatan TPT (yoy) yaitu Provinsi Kalimantan Selatan (0,21 persen poin), Lampung (0,02 persen poin), dan Kalimantan Barat (0,01 persen poin). Provinsi dengan penurunan TPT (yoy) terbesar adalah DKI Jakarta yang turun sebesar 2,45 persen poin

TPT Agustus 2021 yang lebih rendah dibandingkan dengan TPT Agustus 2020 merupakan sinyal baik dari pemulihan ekonomi, yang meskipun mengalami kenaikan dari awal tahun 2021, kenaikan tersebut tidak lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, tercatat bahwa pada kuartal ketiga tahun 2021 kemarin perekonomian berada pada fase ekspansif sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

## Rata-rata Upah dan Gaji

BPS mencatat bahwa secara rata-rata nasional terjadi sedikit penurunan upah atau gaji per bulan dari pekerja pada Agustus 2021 baik dibandingkan dengan Maret 2021 maupun pada Agustus 2020 yaitu masing-masing sebesar 1% dan 4%. Jika dilihat berdasarkan sektor pekerjaan, hampir seluruh sektor mengalami penurunan rata-rata upah/ gaji per bulan, sedangkan sisanya hanya sedikit sektor yang mengalami peningkatan upah/ gaji pada periode ini (yoy), yaitu di antaranya adalah sektor (1) Real Estat (11%); (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (8%); dan (3) Informasi dan Komunikasi (5%).

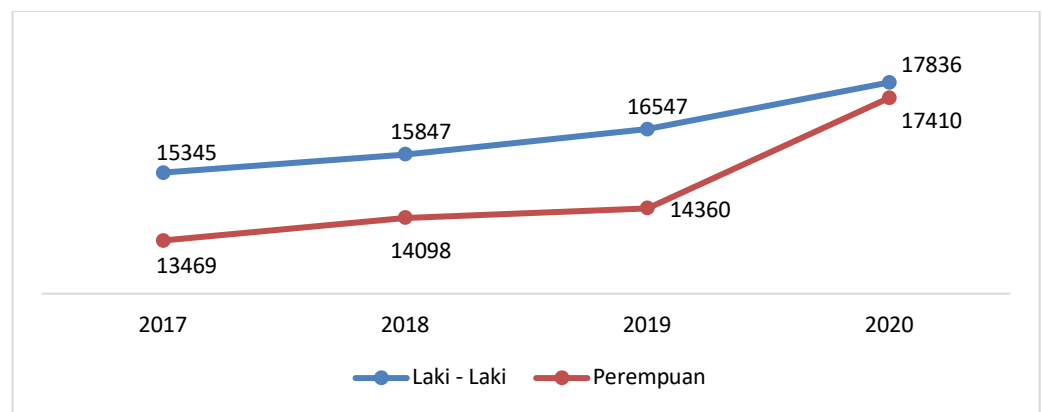
Tabel 2. Rata-rata Upah/ Gaji Berdasarkan Sektor

| Sektor  | Agustus 2020 (Rp) | Agustus 2021 (Rp) | △% 2021-2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Kenaikan Tertinggi</b>                                 |                   |                   |              |
| Real Estat  | 3.350.489         | 3.717.246         | 11%          |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 2.449.753         | 2.638.298         | 8%           |
| Informasi dan Komunikasi                                  | 3.943.383         | 4.131.229         | 5%           |
| <b>Penurunan Tertinggi</b>                                |                   |                   |              |
| Pertambangan dan Penggalian                               | 4.478.006         | 4.330.802         | -3%          |
| Transportasi dan Pergudangan                              | 3.149.968         | 2.959.761         | -6%          |
| Jasa Perusahaan   | 3.348.635         | 3.152.934         | -6%          |

Sumber: BPS, 2021, diolah

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, diketahui bahwa kelompok pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi masih menikmati rata-rata gaji yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok pekerja dengan pendidikan yang lebih rendah. Hal ini terjadi dari masa sebelum pandemi (2019) dan pada masa pandemi (2020). Baik pada tahun 2019 dan tahun 2020, rata-rata upah/ gaji per jam yang diterima oleh pekerja lulusan perguruan tinggi tercatat sebesar 3 kali lipat dibandingkan dengan yang diterima oleh lulusan sekolah dasar.

**Gambar 1. Rata-rata Upah/ Gaji Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber: BPS, 2021, diolah

Selain terdapat gap dari segi latar belakang pendidikan, terdapat gap antara rata-rata upah/ gaji yang diterima oleh pria dibandingkan wanita. Tercatat bahwa pria menerima upah/ gaji per jam yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Meskipun demikian, gap tersebut terlihat semakin mengecil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi perbaikan pada diskriminasi upah/ gaji berdasarkan jenis kelamin pekerja.

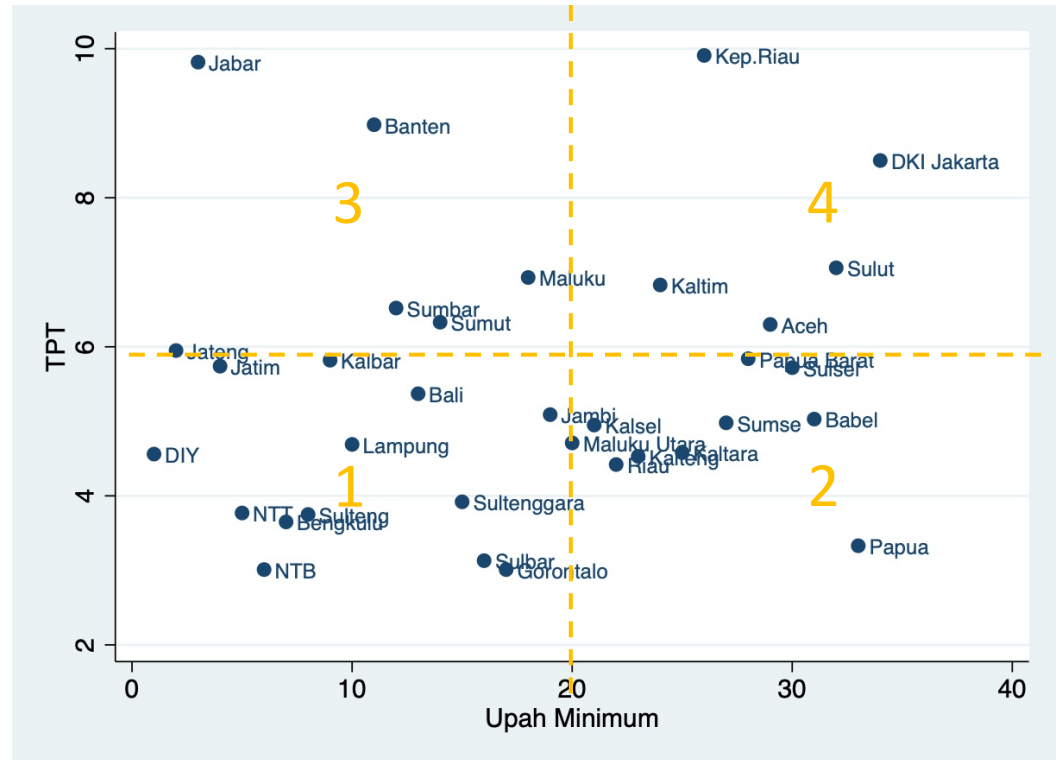
### Isu Terkini: Kenaikan Upah Minimum Provinsi

Penetapan upah minimum dilakukan sebagai bentuk perwujudan perlindungan kepada pekerja/buruh agar tidak dibayar terlalu rendah, yang mana secara umum juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Upah minimum di Indonesia diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 yang mana ditetapkan berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pada tahun 2022 nanti, direncanakan upah minimum secara rata-rata naik sebesar 1,09%.

Berdasarkan teori sederhana pada pasar permintaan dan penawaran tenaga kerja, diketahui bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari harga dari tenaga kerja, dalam hal ini adalah upah. Pada pasar tenaga kerja, berlaku hukum permintaan dimana dengan peningkatan upah, maka tenaga kerja yang diminta akan

menurun. Sebaliknya berdasarkan hukum penawaran tenaga kerja, peningkatan upah, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan semakin tinggi.

**Gambar 2. Pemetaan TPT dan Upah Minimum 2021**



Sumber: BPS dan Kontan, 2021, diolah

Jika melihat gambar di atas, maka terlihat bahwa provinsi di Indonesia dapat dibagi dalam empat kelompok provinsi<sup>1</sup>, yaitu provinsi dengan (1) TPT rendah dan UMP rendah; (2) TPT rendah dan UMP tinggi; (3) TPT tinggi dan UMP rendah; (4) TPT tinggi dan UMP tinggi. Berdasarkan gambar di atas, kuadran satu dan empat menunjukkan kondisi yang sesuai dengan teori pasar tenaga kerja, di mana penerapan upah minimum (*ceteris paribus*) akan memiliki korelasi positif terhadap tingkat pengangguran.

Namun demikian, provinsi yang perlu perhatian lebih dari pemerintah adalah provinsi yang berada di kuadran tiga. Di kuadran tersebut, tingkat pengangguran berada relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain, meskipun upah minimum provinsinya masih berada di bawah median nasional. Kondisi pengangguran yang tinggi ini juga diperkirakan erat kaitannya jumlah penawaran tenaga kerja. Dalam konteks ini, diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan peningkatan UMP yang seragam agar pengangguran tidak meningkat lebih tinggi lagi, termasuk pada mempertimbangkan seberapa elastis permintaan tenaga kerja (yang berasal dari perusahaan dan pemberi

<sup>1</sup> Pembagian kuadran menggunakan batasan median upah minimum dan median TPT (terlihat dari garis putus-putus).

kerja) terhadap perubahan biaya mempekerjakan pekerja (yang tercermin dari peningkatan UMP).

Isu elastisitas di atas turut dikonfirmasi dengan kumpulan provinsi di kuadran kedua, di mana upah minimum relatif lebih tinggi dibandingkan median nasional, namun pengangguran berada relatif di bawah median nasional. UMP di kawasan tersebut erat kaitannya dengan tingkat harga yang relatif tinggi di provinsi-provinsi tersebut. Sebagai contoh, tingkat harga di Papua relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, sehingga UMP secara absolut juga mengikuti tingkat harga tersebut.

#### Referensi:

- <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- <https://www.bps.go.id/indicator/19/1521/1/rata-rata-upah-gaji.html>
- [https://www.bps.go.id/indicator/19/1175/1/upah-rata---rata-per-jam-pekerja-menurut-tingkat-  
pendidikan.html](https://www.bps.go.id/indicator/19/1175/1/upah-rata---rata-per-jam-pekerja-menurut-tingkat-pendidikan.html)
- <https://www.bps.go.id/indicator/19/1174/1/upah-rata---rata-per-jam-pekerja-menurut-jenis-kelamin.html>

